

PERAN PANGKALAN TNI ANGKATAN LAUT CILACAP DALAM PEMBINAAN POTENSI MARITIM GUNA MENGHADAPI IMIGRAN GELAP

THE ROLE OF INDONESIAN NAVY BASE IN CILACAP IN PARTICULATION OF MARITIME POTENCY TO DEAL WITH ILLEGAL MIGRANTS

Agus Adriyanto¹, Hari Mulyadi², Ansori³
Strategi Perang Semesta
(harimulyadi@idu.ac.id)

Abstrak -- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen potensi maritim terhadap masyarakat pesisir, dan menganalisis faktor-faktor yang berkembang dalam pelaksanaan manajemen potensi maritim melalui pemantauan imigran ilegal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa hasil penelitian: Peran Pangkalan Angkatan Laut Cilacap dalam mengelola potensi bahari yang dikemas dalam Manajemen Potensi Maritim (Binpotmar), melakukan lima keterampilan teritorial dan hasil pengembangan potensi maritim dapat dirasakan nilai manfaatnya oleh masyarakat. daerah pesisir, lemahnya kerjasama dan pengawasan penanganan imigran ilegal. Dengan dukungan pengelolaan potensi bahari yang dikemas dalam lima implementasi ketrampilan teritorial telah mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu: pembentukan ruang, instrumen, kondisi perjuangan dan realisasi kesatuan TNI-AL dan masyarakat dalam seluruh wilayah kerja Pangkalan Angkatan Laut Cilacap dalam rangka mendukung tugas inti Cilacap Naval Base agar bisa menangani imigran gelap.

Kata Kunci: Peran Pangkalan Angkatan Laut Cilacap, Manajemen Potensi Kelautan, Ilegal Imigran

Abstract -- This study is aimed to analyze the implementation of maritime potential management towards people of the coastal area, and analyze the developing factors in the implementation of maritime potential management through illegal immigrants monitoring. This study uses qualitative method with case study approach, through in-depth interview, observation, and documentation. In this study, the researcher found several results of research: Cilacap Naval Base's role in managing maritime potential packed in Maritime Potential Management (Binpotmar), conducting the five territorial skills and the results of maritime potential development can be felt the value of benefits by people of coastal area, weak cooperation and supervision on the handling of illegal immigrants. With the support of managing maritime potential packed in the five territorial skills implementation has been able to achieve the goals which have been set, that is: the formation of space, instrument, condition of struggle and the realization of TNI-AL and people unity in all working areas of Cilacap Naval Base in order to support the core tasks Cilacap Naval Base in order to deal with illegal immigrants.

Keywords: Role of Cilacap Naval Base, Maritime Potential Management, Illegal Immigrant

¹ Penulis adalah mahasiswa Program Studi Strategi Perang Semesta Universitas Pertahanan.

Pendahuluan

Mengacu pada pendapat Cribb, R dan Ford, M (2009) yang menyatakan bahwa pengelolaan laut penuh dengan paradoks.² Di satu sisi laut dilihat sebagai sumber kerentanan jika tidak dikelola dengan baik tetapi di sisi lain juga memberikan berkah tersendiri. Laut bisa menjadi tempat yang menguntungkan bagi berkembangnya kekuatan musuh dan orang-orang yang memiliki niat jahat terhadap negara dan orang lain. Bukan saja hal itu dibuktikan oleh adanya kejadian-kejadian perampokan di laut, tetapi juga untuk kasus Indonesia, secara historis kedatangan kolonial ke Indonesia terjadi melalui jalur laut (Octavian, A & A. Yulianto, 2015). Selain itu, maraknya penyelundupan senjata, obat-obatan terlarang, pencurian ikan serta imigran gelap pencari suaka yang melewati jalur laut.

Tugas dari TNI adalah untuk melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang tentang TNI, pasal 7 (2) huruf b angka 8, yang menugaskan TNI untuk memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan Sistem

Pertahanan Semesta (Sishanta). Pemberdayaan Wilayah Pertahanan merupakan kegiatan untuk perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengerahan, pengendalian serta pemanfaatan semua potensi nasional yang ada (geografi, demografi, sumber daya alam/buatan, sarana dan prasarana, nilai, teknologi dan dana) untuk menjadi kemampuan dan kekuatan wilayah yang tangguh.

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) sebagai bagian dari TNI mengemban tugas untuk memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta). Tugas TNI AL adalah, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi, melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah, melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Pangkalan TNI AL (Lanal) Cilacap selaku Komando Kewilayahan (Kowil) TNI AL salah satu tugas pokoknya

² Cribb, R&Ford, M (2009).

melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di laut (Dawihanla) melalui Binpotmar di wilayah kerja Lanal Cilacap meliputi: Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo. (Lanal Cilacap, 2016). Pelaksanaan Binpotmar dilaksanakan oleh staf Potensi Maritim (Potmar) Lanal Cilacap sesuai dengan surat keputusan Danlantamal V nomor: Kep/44/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Organisasi Prosedur (Orgapros) Lanal Cilacap mempunyai tugas sebagai berikut: pertama: menyusun dan melaksanakan rencana dan program pembinaan potensi maritim berdasarkan rencana dan program Lanal Cilacap, kedua: menetapkan ketentuan pelaksanaan kegiatan pengamanan dan pembinaan potensi maritim, ketiga: mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi tentang potensi maritim dalam rangka pembinaan menjadi kekuatan pertahanan dan keamanan di laut.

Menurut Subagyo, A dan Wirasuta, D. S (2013) bahwa para Imigran gelap atau pengungsi berasal dari negara-negara yang rawan akan konflik dan minim akan keamanan seperti Pakistan, Myanmar, Afghanistan, Iran, Srilangka, Bangladesh, dan Syiria. Para pengungsi ilegal yang mencari suaka dan transit di Indonesia

tersebut, biasanya disebut sebagai manusia perahu atau “*boat people*”. Manusia perahu ini terdiri dari laki-laki dan perempuan bahkan tidak sedikit anak-anak dan balita yang mengarungi lautan menggunakan perahu sewaan dengan peralatan dan bekal seadanya. Maka sering kali perahu yang dinaiki oleh para imigran ilegal ini mengalami kecelakaan di tengah laut akibat diterjang ombak dan banyak dari mereka yang terdampar di perairan Indonesia. Demikian juga Imigran gelap yang masuk wilayah Cilacap terjadi karena mengalami kecelakaan di tengah laut atau kehabisan logistiknya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dapat mempengaruhi Peran Pangkalan TNI AL (Lanal) Cilacap dalam Pembinaan Potensi Maritim (Binpotmar) guna menghadapi imigran gelap sudah berjalan, Terkait dengan masalah diatas, maka dirumuskan masalah penelitian yaitu: Bagaimana Peran Pangkalan TNI AL (Lanal) Cilacap dalam Binpotmar guna menghadapi menghadapi Imigran Gelap? Selanjutnya rumusan masalah ini dapat diwujudkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut.

- a. Bagaimana pelaksanaan Pembinaan Potensi Maritim terhadap masyarakat pesisir di wilayah Lanal Cilacap?
- b. Apa faktor-faktor yang berkembang dapat mempengaruhi pelaksanaan Pembinaan Potensi Maritim di Lanal Cilacap?
- c. Bagaimana peran Lanal Cilacap dalam Pembinaan Potensi Maritim menangani Imigran Gelap?

Tinjauan Pustaka

Menurut Sugiyono (2010:58) dalam memahami metode kualitatif menyatakan bahwa deskripsi teori dalam penelitian merupakan fungsi untuk menjelaskan variable yang akan diteliti, definisi deskripsi teori yaitu berisi uraian sistematis tentang teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variable yang diteliti. Teori-teori yang dideskripsikan dalam proposal maupun laporan penelitian dapat digunakan sebagai indikator bagi peneliti, dalam melaksanakan penelitian.

Teori Peran

Menurut Kreitner, Robert dan Angelo Kinicki (2014: 14) dalam bukunya perilaku organisasi mengatakan bahwa peran adalah tatanan perilaku yang diharapkan seseorang dari suatu posisi. Teori peran mencoba menjelaskan bagaimana

ekspektasi sosial ini berpengaruh pada perilaku penerima peran (pelaku). Bagian ini menelusuri teori peran dengan menganalisis sebuah episode peran dan ditemukan posisi seseorang atau organisasi dalam bentuk peran berlebih, pertentangan peran dan ambiguitas peran.

Dengan teori ini akan dapat memberikan gambaran pada posisi apa Binpotmar dapat di implementasikan dan faktor-faktor pendukung apa yang dapat menefektikan peran Pangkalan TNI AL Cilacap dalam Binpotmar itu sendiri, sehingga tidak terjadi peran berlebih atau terjadi pertentangan peran atau terjadi ambiguitas peran. Kemampuan untuk memainkan peran dengan tepat tanpa mencampuri ranah tugas institusi lainnya akan memberikan peran yang efektif dan dapat membantu penyelesaian permasalahan dengan efisien.

Teori Pembinaan

Menurut Mathis, Robert.L dan Jackson, Jhon.H (2009) pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas. Sedangkan Ivancevich, John (2008:46),

mendefinisikan pembinaan sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Peran Pangkalan TNI AL Cilacap dalam melaksanakan pembinaan potensi maritim terhadap masyarakat desa pesisir guna menghadapi imigran gelap dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu berasal dari sudut rencana pembinaan strategis dan *empowerment*. Dari sudut rencana pembinaan strategis yaitu mengatur strategi, merencanakan, mengorganisasi dan memberi pembenaran sesuatu menjadi yang baru dan memiliki nilai-nilai lebih baik bagi kehidupan masa yang akan datang. Sedangkan *empowerment* atau pemberdayaan dengan melakukan memekarkan potensi dan membangun kepercayaan diri, menumbuhkan kesadaran kritis-konstruksi bertanggung jawab, mendorong mereka berperan sosial-aktif.

Teori Pengawasan

Menurut George R. Terry (2006) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, artinya mengevaluasi

prestasi kerja dan apabila perlu, dengan menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pengawasan yang efektif membantu usaha dalam mengatur pekerjaan agar dapat terlaksana dengan baik. Fungsi pengawasan merupakan fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini terdiri dari tugas-tugas peran Pangkalan TNI AL (Lanal) Cilacap agar target pembinaan potensi maritim tercapai. Dengan kata lain fungsi pengawasan menilai apakah rencana yang ditetapkan pada fungsi perencanaan telah tercapai.

Teori Sinergitas

Menurut teori sinergitas yang disampaikan oleh Stonner, James, A.F. (1996) bahwa hubungan antara dua pihak dapat menghasilkan tingkat komunikasi dihadapkan pada elemen kerjasama dan kepercayaan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disintesis kerjasama antara Pangkalan TNI AL Cilacap dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Binpotmar melalui sinergitas kerja sama kreatif yang saling menghormati untuk menggabungkan kekuatan dan mengkompensasikan kelemahan. Kerjasama yang terjalin

diharapkan akan menghasilkan keluaran yang lebih besar dari masing-masing pihak, sehingga memiliki kekuatan dan kemampuan guna menghadapi imigran gelap di wilayah Cilacap.

Imigran Gelap

Menurut Subagyo, A dan Wirasuta D. S (2013; 157) bahwa Penyelundupan Manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak. Imigrasi adalah perpindahan orang dari suatu negara ke negara lain, di mana ia bukan merupakan warga negara. Imigrasi merujuk pada perpindahan untuk

menetap permanen yang dilakukan oleh imigran, sedangkan turis dan pendatang untuk jangka waktu pendek tidak dianggap imigran. Walaupun demikian, migrasi pekerja musiman (umumnya untuk periode kurang dari satu tahun) sering dianggap sebagai bentuk imigrasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, menurut Moleong, Lexy J. (2011, 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi secara langsung dengan mengamati gejala/fenomena tentang fokus penelitian, melalui wawancara dengan bertanya secara langsung kepada informan untuk mengumpulkan keterangan-keterangan dan informasi yang diperlukan dalam mendukung analisis penelitian. Selain itu melalui studi pustaka untuk mengumpulkan berbagai data sekunder dengan cara penelaahan dan membandingkan berbagai sumber kepustakaan yang terdiri dari: buku, jurnal, dokumen resmi, media dan elektronik untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah penelitian.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan cara perolehan informan pertama, dengan cara *purposive* atau disengaja sebelum melakukan penelitian peneliti menetapkan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sumber informasi, dan dengan cara *snowballing*.

Tehnik Pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan wawancara mendalam dan pengumpulan dokumen yang diperoleh dari para informan serta berbagai sumber yang digunakan untuk memperkuat data dari penelitian ini.

Peneliti menggunakan terminologi informan dengan maksud bahwa informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam.

Analisa Data dan Pembahasan

Pangkalan TNI AL (Lanal) Cilacap sebagai salah satu Komando Kewilyahan yang berkedudukan di Cilacap juga melaksanakan Pembinaan Potensi Maritim yang dilaksanakan secara rutin dari tahun ke tahun yang tergambar dengan sangat jelas dari berbagai kegiatan Binpotmar dalam berbagai

wujud implementasinya. Dari kegiatan dalam program maupun non program tersebut diperoleh gambaran bahwa kegiatan Binpotmar tersebut terbagi menjadi dua bagian besar yaitu menyangkut pembinaan Lanal terhadap Binpotmar itu sendiri (pengelolaan) dan Lanal dalam penggunaan Binpotmar di aplikasikan khususnya penggunaan Binpotmar pada masa damai.

Pelaksanaan Kegiatan Sistem Perencanaan Pengendalian Binpotmar. Kadispotmar Mabesal dan Danlanal Cilacap dalam penjelasannya mengatakan dalam manajemen Binpotmar, dibuat untuk merencanakan kegiatan Binpotmar secara teratur, terkoordinasi dan terpadu agar rencana kegiatan Binpotmar dengan program kegiatan TNI AL dan di ajukan ke Pemerintah Daerah dan instansi terkait untuk kepentingan kesejahteraan dan kepentingan pertahanan negara di laut dalam rangka keamanan nasional.

Data-data yang telah dicatat secara mendetail mengenai kondisi geografi, demografi dan kondisi sosial dalam petunjuk potensi maritim tersebut kemudian di ekstrak untuk mendapatkan potensi-potensi dari masing bidang tersebut untuk di telaah dan dianalisis secara mendalam terkait dengan potensi-potensi mana saja yang bisa untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa pesisir maupun untuk membantu meningkatkan keamanan laut. Tahap selanjutnya setelah mengetahui potensi-potensi tersebut disusun rencana kegiatan Binpotmar untuk membina potensi tersebut menjadi kekuatan kewilayahan.

Menurut Kasi Deportasi Dirjen Imigrasi Kemendikbud dan HAM mengatakan bahwa imigran gelap yang masuk wilayah Indonesia adalah para pengungsi yang biasanya berasal dari negara-negara yang rawan akan konflik dan minim akan keamanan seperti Pakistan, Myanmar, Afghanistan, Iran, Sri Lanka, Bangladesh, dan Syria. Para pengungsi yang mencari suaka tidak dilengkapi dokumen, modusnya sama dengan penyelundupan manusia (imigran ilegal) dan transit di Indonesia tersebut, biasanya disebut sebagai manusia perahu atau "*boat people*". Perahu ini terdiri dari laki-laki dan perempuan bahkan tidak sedikit anak-anak dan balita yang mengarungi lautan menggunakan perahu sewaan dengan peralatan dan bekal seadanya. Maka sering kali perahu yang dinaiki oleh para imigran ilegal ini mengalami kecelakaan di laut akibat diterjang ombak dan banyak dari mereka yang terdampar di perairan

Indonesia. Para pengungsi menggunakan jasa nelayan negara sekitar untuk melakukan perjalanan laut menuju Australia menggunakan kapal nelayan digunakan untuk mencari ikan.

Hal tersebut karena para pengungsi terdesak akan hempitan keamanan dan keselamatan jiwa jika harus tinggal lebih lama di negara asalnya. Untuk mendapatkan suaka dan perlindungan di Australia, para pengungsi dengan jalur ilegal melakukan perjalanannya menggunakan perahu tradisional secara massal. Tidak sedikit dari kapal mereka tenggelam diterjang ombak di perairan laut Indonesia. Namun tidak sedikit juga dari para imigran ilegal ini yang menjadikan Indonesia sebagai tempat transit sementara sebelum kembali melanjutkan perjalanan menuju Australia. Indonesia menjadi tempat yang biasa dijadikan sebagai tempat peristirahatan sementara bagi para imigran ilegal yang akan melanjutkan perjalanannya ke Australia. Hal tersebut mendapat penguatan dari pernyataan Danlanal Cilacap bahwa setelah mengalami pemeriksaan sementara di Lanal Cilacap, para imigran gelap sebagian besar dari negara-negara yang sedang mengalami konflik di negaranya.

Menurut Subagyo, A dan Wirasuta, D. S (2013) bahwa ada beberapa alasan yang menjadikan para imigran ilegal ini sering menjadikan Indonesia sebagai lokasi transit sebelum melanjutkan perjalanan menuju Australia. Pertama adalah, adanya kesan dari imigran ilegal adanya kemudahan akses untuk masuk ke Indonesia. Kedua, lokasi strategis Indonesia yang berdekatan dengan Australia. Hal ini memungkinkan bagi para imigran ilegal untuk dapat melakukan perjalanan baik melalui darat maupun udara untuk dapat mencapai negara tujuan yaitu Australia. Ketiga, negara Indonesia yang terdiri dari banyak pulau menjadikan para imigran dapat masuk ke Indonesia dari berbagai lokasi. Keempat, minimnya pengawasan dan kontrol serta sarana prasarana pendukung operasional perairan Indonesia juga menjadi penyebab banyaknya imigran ilegal berhasil masuk ke Indonesia. Apabila melihat faktanya, di pantai selatan P. Jawa seperti Cilacap merupakan pantai yang ideal tempat transit bagi imigran gelap dan jalur paling dekat menuju Australia serta memiliki garis pantai yang panjang.

Penanganan imigran gelap yang lebih bagus atau terbaik adalah bagaimana mencegah imigran masuk

wilayah Indonesia. Terkait dengan upaya atau tindakan untuk mencegah imigran gelap siapa saja boleh melakukannya. Kalau di wilayah kita jelas ada orang asing tanpa dilengkapi perijinan atau dokumen resmi ini akan mengganggu kenyamanan di lingkungan masyarakat. Sebagai aparat setempat harus tahu gejala itu dan harus bertindak, tidak perlu menunggu petugas yang berwenang. Upaya pencegahan berbagai macam ragam bisa dilaksanakan, seperti yang dikatakan Gatot Nurmantyo, bahwa kita harus baik-baik dengan rakyat, hal ini menginspirasi bahwa kalau kenal baik dengan orang lain maka akan memberikan dampak positif. Dengan kenal dengan masyarakat desa pesisir maka nelayan yang akan melindungi, membantu dan menyiapkan sarana untuk imigran gelap timbul rasa segan untuk berbuat diwilayahnya.

Hal ini juga telah diaplikasikan oleh Lanal Cilacap dengan jajarannya dimana dibuat kebijakan bahwa seluruh wilayah pesisir di sepanjang pantai selatan P. Jawa (Cilacap, Kebumen dan Purworejo) aparat potensi maritim harus di kenal dengan masyarakat desa pesisir dan kalau bisa aparat potmar juga harus mengenal secara baik warga binaannya, paling tidak dikenal orang tetapi siap membantu mengatasi kesulitan masyarakat

binaannya. Dengan sikap yang dimiliki aparat potmar tersebut diyakini oleh Danlanal Cilacap warga akan segan untuk berbuat atau membantu orang asing (imigran gelap) dan enggan melakukan kegiatan melawan hukum meskipun belum ada jaminan untuk itu.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Binpotmar telah menjadi fungsi utama TNI AL, namun faktanya dalam program dan kegiatan belum menjadi prioritas. Demikian juga dengan pengisian personel satuan potensi maritim, cenderung di isi dengan prajurit-prajurit yang tidak mampu secara fisik di satuan operasi. Dan lanal Cilacap menjelaskan bahwa prajurit yang menjadi anggotanya rata-rata sudah tua dan banyak dari mereka dalam waktu kurang lima tahun memasuki usia pensiun. Demikian juga dengan kemampuan personel dibidang potensi maritim khususnya kemampuan untuk berkomunikasi, masih jauh dari harapan. Komunikasi sosial salah satu kegiatan strategis bagi satuan potensi maritim, tanpa komunikasi sosial yang baik dan memadai maka pelaksanaan pembinaan potensi maritim tidak mencapai target keberhasilan.

Dalam menghadapi imigran gelap bila dihadapkan pada konsep Lanal dalam Binpotmar khususnya manajemen

pembinaan potensi maritim yang disebut Sistem Perencanaan Pembinaan Potensi Maritim, yang merupakan sistem pembinaan yang dikembangkan untuk mampu mendata keadaan wilayah perairan/pesisir baik dalam bentuk potensi-potensi SDA/B, sarana prasana maupun hal-hal yang negatif yang ada di wilayah pesisir ini adalah merupakan kegiatan pendataan/identifikasi seperti dalam penggunaan untuk melaksanakan pengawasan terhadap imigran gelap atau manusia perahu. Hasil yang di dapat melalui pendataan/identifikasi tersebut selanjutnya di telaah atau di analisis melalui kegiatan analisa potensi maritim untuk memetakan secara pasti di wilayah perairan/pesisir yang memiliki kerawanan tingkat tinggi, sedang dan kondusif. Dari hasil pemetaan ini kemudian disusun rencana pembinaannya yang disesuaikan dengan kondisi wilayah perairan/pesisir tersebut secara terus menerus dan berkesinambungan sampai mencapai kondisi kondusif yang di inginkan dapat terwujud dengan baik.

Lanal Cilacap dalam Binpotmar yang dikombinasikan dengan pembinaan dan penerapan lima kemampuan teritorial dalam bentuk: temu cepat dan lapor cepat, sebagai upaya untuk mempeoleh keterangan secara cepat dan *up to date*

melalui kegiatan deteksi dini dengan pengawasan di wilayah perairan/pesisir daerah binaannya melalui jaringan-jaringan potensi maritim yang meliputi wilayah binaannya dan melaporkan dengan cepat kepada atasan secara lisan yang diikuti dengan laporan tertulis dan ditindaklanjuti dengan tindakan antisipasi dalam bentuk cegah dini; kemampuan manajemen teritorial, sebagai kegiatan untuk mengembangkan program binpotmar secara sistemik melalui kegiatan perencanaan yang matang, pengorganisasian yang baik, dan pelaksanaan dikendalikan dan diawasi dengan baik sehingga dapat menghasilkan kegiatan binpotmar terpadu; kemampuan penguasaan wilayah pesisir, upaya berupa kegiatan untuk mengenali secara mendalam ciri-ciri potensi geografi (SDA/B dan sarana prasana), demografi dan kondisi sosial di wilayah pesisir, selanjutnya di data dalam bentuk peta rawan ancaman sehingga dapat di antisipasi serta mampu merumuskan langkah untuk penggunaan, pencegahan dan penangkalannya; Kemampuan ketahanan wilayah, kegiatan untuk membina dan memotivasi untuk menumbuhkan cinta tanah air, wawasan kebangsaan serta kesadaran berbangsa dan bernegara untuk menumbuhkan

militansi masyarakat desa pesisir dalam bentuk semangat bela negara atau setidak-tidaknya masyarakat pesisir mencintai perairan/pesisir tempat tinggalnya; komunikasi sosial, sebagai sebuah metode pendekatan kepada masyarakat dengan cara melakukan komunikasi dengan segenap komponen bangsa guna terwujudnya saling pengertian, pemahaman, saling percaya dan tercipta kohesivitas antara aparat dengan komponen bangsa lainnya

Dari kegiatan yang dilaksanakan Lanal Cilacap dalam Binpotmar tersebut ditengarai semua kegiatan menghadapi imigran gelap dengan melakukan pemeriksaan/penyelidikan, pengawasan atau evakuasi imigran gelap, hal ini sudah diimplementasikan dalam kegiatan Binpotmar, dengan demikian pemerintah melalui Dirjen Imigrasi, Kemenkum dan HAM cukup melakukan kerjasama dan sinergitas dengan Komando Kewilayahan untuk melaksanakan penangana terhadap imigran gelap dan orang asing di perairan/pesisir. Dalam penanganan imigran gelap/orang asing, Dirjen Imigrasi Kemenkum dan HAM dapat melibatkan Lanal dalam kegiatan pemeriksaan/penyelidikan awal, pengawasan dan evakuasi imigran gelap/orang asing mengingat para

imigran gelap warganegara asing yang tidak diketahui asal usul identitasnya sehingga perlu di curigai akan melaksanakan infiltrasi ke negara Indonesia. Dengan adanya pemeriksaan atau penyelidikan oleh Lanal dengan harapan untuk mendapatkan hasil maksimal dalam rangka terwujudnya stabilitas pertahanan dan keamanan di daerah.

Simpulan

Berdasarkan analisis terhadap fakta dan data yang diperoleh dari hasil penelitian serta di hadapkan pada teori-teori yang dijadikan dasar pemikiran dalam tulisan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Lanal Cilacap dalam Pembinaan Potensi Maritim sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa pesisir dan di susun manajemen potensi maritim dengan Sisrendal Binpotmar yang di dukung dengan implementasi lima kemampuan teritorial telah mampu mencapai sasaran yang ditetapkan.
- b. Pelaksanaan Lanal Cilacap dalam Binpotmar beberapa diantaranya masih minimnya program kegiatan akibat alokasi dana yang kurang memadai berdampak pada kurang maksimalnya kegiatan pembinaan

potensi maritim namun dengan dukungan stakeholders (Pemda, BUMN, Lembaga Pemerintah) dapat meningkatkan intensitas kegiatan serta interaksi antara aparat potmar dengan masyarakat desa pesisir/nelayan.

- c. Peran Lanal Cilacap dalam pembinaan potensi maritim telah melaksanakan kegiatan pengawasan dan evakuasi tetapi juga mempunyai peran seperti: pembinaan masyarakat desa pesisir dan pembinaan bela negara.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka untuk lebih meningkatkan hasil dari pelaksanaan Lanal dalam Binpotmar agar dapat memaksimalkan peran guna menghadapi imigran gelap, disarankan sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) baik kuantitas dan kualitas perlunya Komando Atas untuk meningkatkan alokasi dana pembinaan potensi maritim baik untuk pengadaan sarana pendukung maupun peningkatan jumlah program kegiatan, serta menjadikan Binpotmar sebagai program poros maritim dunia.
- b. Mabes TNI AL perlu melakukan evaluasi secara intensif mengenai

penempatan personel di Pangkalan-Pangkalan TNI AL dan diganti dengan personel yang masih lama usia pakainya serta dibekali dengan pengetahuan atau penataran ilmu berkomunikasi agar pelaksanaan pembinaan potensi maritim dapat optimal dan berdayaguna.

- c. Mabes TNI AL perlu melakukan *Memorandum of Understanding (MOU)* dengan Dirjen Imigrasi, Kemenkum dan HAM dalam rangka kerjasama pengawasan manusia perahu atau imigran gelap di kawasan perairan atau pesisir, mengingat kegiatan Lanal dalam Binpotmar dalam manajemen potensi maritim untuk membantu pengawasan maupun melaksanakan evakuasi serta menciptakan situasi yang kondusif di wilayah perairan dan pesisir dan telah menyatu dengan dinamika masyarakat desa pesisir.

Daftar Pustaka

- Cribb, R and Michael, F. 2009. *Indonesia beyond the Water's Edge: Managing an Archipelagic State*. ISEAS, Singapore.
- Kreitner, R dan Angelo, K. 2014. *Perilaku Organisasi*. Salemba Empat Jakarta.
- Moleong, L. J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Octavian, A & Bayu, A.Y. 2014. *Budaya, Identitas dan Masalah Keamanan*

Maritim. Universitas Pertahanan Indonesia, Jakarta.

Rudiawan, B Jakarta. Implementasi Kemitraan Dispotmar Armatim dengan Dispotmar Lantamal V Dalam Pembinaan dan Pemberdayaan Nelayan di Surabaya, Universitas Pertahanan Tahun 2012, Jakarta.

Satria G. Upaya Penanganan Imigran Ilegal Di Indonesia. Universitas Jember Tahun 2009, Jakarta

Stonner, J. A.F. 1996. *Manajemen*. Edisi II. Prenhalindo ; Jakarta.

Subagyo, A & Wirasuta D. S, Penyelundupan Manusia dan Ancaman Keamanan Maritim Indonesia, *Jurnal Pertahanan* Desember 2013, Volume 3

Sugiyono. 2006. *Memahami Penelitian Kualitatif*, PT. Alfabeta. Bandung.

Vera P. N. Upaya International Organization For Migration (IOM) Dalam Menangani Masalah Imigran Gelap di Indonesia. Universitas Indonesia Tahun 2007, Jakarta.

Perundang-undangan

Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI.

Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2001 Tentang Keimigrasian.

